



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024**

**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN**



**Padang, Desember 2024**

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbal `alamiin atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Tujuan sub kegiatan ini antara lain untuk mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah), mewujudkan keselarasan dan sinergi sasaran pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pembahasan terhadap rancangan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Bidang Pemerintahan (Rencana Strategis dan Rencana Kerja), serta perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yang menggambarkan pelaksanaan sub kegiatan beserta lampiran dan prosiding.

Demikian laporan ini dibuat untuk sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke depan, terima kasih.

Padang, Desember 2024  
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,



**Andre Ola Vetric, SE, MM**  
NIP. 19821030 200802 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sasaran .....	2
1.4. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Rapat Persiapan Pembahasan/Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	5
2.2. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Bidang Pemerintahan .....	5
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT .....</b>	<b>8</b>
3.1. Permasalahan .....	8
3.2. Upaya Tindak Lanjut .....	8
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Contoh :</b>	
- Nota Dinas	
- Surat Undangan	
- Notulen Rapat	
- Laporan Pelaksanaan	
- Dokumentasi	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mencapai Visi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dan bertekad untuk mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023.

Hal ini didukung dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai salah satu tugas pokok yakni melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik dan selaras dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 dan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan pembangunan dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar hasilnya dapat dinikmati sampai kepada lapisan bawah, diperlukan asistensi terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, pasal 84 ayat 4 dan 5 : Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat daerah dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

## **2. TUJUAN**

- a. Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah).
- b. Terwujudnya keselarasan dan sinergi sasaran pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan.

## **3. SASARAN**

Sasaran Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- b. Menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- c. Memastikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

#### **4. DASAR HUKUM**

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 dialokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Sumatera Barat awalnya sebesar Rp.41.286.800,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan paket-paket sub kegiatan, antara lain :

- a. Pembahasan dan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Bidang Pemerintahan Tahun 2025.
- b. Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Bidang Pemerintahan Tahun 2024.

Pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 anggaran Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 berkurang menjadi Rp.38.183.800,- (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi Rp.37.362.300,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah (97.84%).

Untuk itu kegiatan - kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan PO/KAK
2. Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2024
3. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama untuk pencapaian target pembangunan daerah adalah melalui asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, antara lain :

### **2.1. Rapat Persiapan Pembahasan/Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025**

Pembahasan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan berdasarkan a) Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah, dengan penelaahan pada masing-masing rincian belanja pada RKA Sub Kegiatan yang telah diinput kedalam SIPD RI, b). Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKP dan Program Strategis Nasional.

Pembahasan/Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPDP Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPDP Provinsi Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 30 Mei 2024.

### **2.2. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Bidang Pemerintahan**

Dalam rangka penyempurnaan RKPDP Tahun 2025, dilaksanakan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja PD Tahun 2025 untuk melihat capaian indikator RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, permasalahan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, kemudian program dan kegiatan yang mendukung sesuai dengan permasalahan yang ada pada PD, kemudian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD pada lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta sekaligus melihat kesesuaian isi Renja yang telah dibuat oleh PD dengan sistematika penulisan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembahasan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan pada tanggal 13 sd. 30 Mei 2024 berdasarkan a) Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah, dengan penelaahan pada masing-masing rincian belanja pada RKA Sub Kegiatan yang telah diinput kedalam SIPD RI, b). Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKP dan Program.

Pembahasan/Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

Pelaksanaan pembahasan dan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang menjadi catatan pembahasan, apakah usulan sub kegiatan mendukung Program Unggulan, SPM, DAK, Pokir, Mandatori Pusat, Direktif, IKU/IKD, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan beberapa arahan pimpinan lainnya.

Fokus verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 yakni :

- a. memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan kinerja dan pagu indikatif, Lokasi kegiatan serta penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas Pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)
- b. Tindak lanjut terhadap hasil reviu Inspektorat terhadap Laporan Hasil Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023
- c. Penyesuaian cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
- d. Rasionalisasi anggaran pada DPA tahun 2024
- e. Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan SE Gubernur No. 030/237/BPKAD-PAP/2024 tentang Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
- f. Tindak lanjut hasil evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD tahun 2024.

Mekanisme Pembahasan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI dan Sakato Plan sesuai dengan Usulan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 yang telah diinput.

Alat Bantu Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 antara lain Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026.

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Nomor 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 00.7/41/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Adapun hasil Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat disepakati dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing anggota tim dan perangkat daerah.

Hasil Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang telah disepakati untuk dilakukan penyempurnaan entry kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **3.1. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi dengan lintas sektor dan Perangkat Daerah (PD), antara lain:

- a. Masih ditemui usulan Rencana Kerja (Renja) PD yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- b. Disamping itu, juga masih ditemui usulan program/kegiatan pada Renja OPD Provinsi yang belum memperhatikan konsistensi dan kesesuaian dengan sasaran dan indikator kinerja mulai dari RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja dan KUA-PPAS dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- c. Pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah masih belum mengakomodir kegiatan dan sub kegiatan yang khusus di daerah, sehingga ada beberapa sub kegiatan yang tidak tepat/cocok dimasukkan dalam kegiatan yang sudah ditentukan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

#### **3.2. Upaya Tindak Lanjut**

Upaya tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas, antara lain:

1. Diharapkan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia supaya mempelajari dan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan perencanaan harus mempedomani dan mengacu dokumen perencanaan yang sudah ada, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja dan KUA-PPAS serta aturan-

aturan lainnya dari pusat dalam penyusunan perencanaan supaya ada konsistensi dan kesesuaian perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

3. Kepada PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan perencanaan agar memperhatikan keterkaitan dan kesinkronan dengan Perangkat Daerah terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Perangkat Daerah (PD) maka diperlukan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah pemerintah provinsi terkait dengan target capaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026, keterkaitan dengan Renstra dengan RPJMD dan keterkaitan Renja dengan RKPD supaya terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang baik.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan bagi terwujudnya proses penyusunan dokumen pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Termasuk dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
4. Melalui asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah diharapkan terciptanya kesamaan pemahaman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk pencapaian target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, khususnya di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
5. Dengan adanya sistem aplikasi sakato plan perencanaan yang disusun diharapkan bisa akan mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

# LAMPIRAN

# Contoh : Surat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Nomor : 005/1/I/PPM/Bappeda-2024

Padang, 2 Januari 2024

Lampiran : -

Perihal : Rapat Persiapan Awal Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kepada Yth :

1. **Fungsional Perencana Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

2. **Fungsional Umum Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

di

**PADANG**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

- Pada tahun 2024 salah satu sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yakni Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Berkenaan dengan hal tersebut diminta kehadiran Saudara pada Rapat Persiapan Awal (RPA) pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Januari 2024

Pukul : 09.00 sd. selesai

Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Agenda : Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sekaligus identifikasi progres Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 masing-masing penulis lingkup Bidang PPM

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*

**Andre Ola Vetric, SE, MM**  
 NIP. 19821030 200802 1 001

Sembutan disampaikan kepada Yth.  
 Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 020/15/I/SK/PPM/Bappeda-2024

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN  
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk optimalisasi proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Sub Kegiatan :
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
  - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024 mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perencanaan pembangunan dengan berpedoman terhadap dokumen perencanaan (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dan kesesuaian antara penetapan indikator kinerja dengan rincian pembiayaan, baik Belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa, maupun Belanja Modal.
  - b. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
  - c. Melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - d. Melakukan verifikasi terhadap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota.
  - e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi antar pemangku kepentingan, antar lintas sektor dan antar wilayah dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Januari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**MEDI ISWANDI, ST, MM**  
Kepala  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 199903 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425  
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: [pdeisb@sumbar.go.id](mailto:pdeisb@sumbar.go.id) Padang

Padang, 2 Mei 2024

Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Hal : Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagaimana terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
2. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan 2024 akan dilaksanakan secara bersamaan dan dengan melibatkan Tim Verifikasi dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada :

**Hari/Tanggal** : **jadwal sebagaimana terlampir**

**Waktu** : **jadwal sebagaimana terlampir**

**Tempat** : **Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat (Ruang Rapat terlampir)**

3. Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dapat hadir bersama dengan :
  - a. Sekretaris/Kabag yang membawahi Tata Usaha bersama dengan Kasubag Program/Pejabat fungsional perencana dan staf subag program
  - b. Kepala Bidang beserta Pejabat Eselon IV/Fungsional tertentu sebagai pengelola program/kegiatan
  - c. Kasubag Keuangan beserta staf subag keuangan
4. Fokus verifikasi tersebut pada Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, yakni :
  - a. memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)
  - b. tindak lanjut terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023
  - c. penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
  - d. Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024
  - e. memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
  - f. tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024

5. Berkenaan hal tersebut, pada saat pembahasan, diminta kepada Perangkat Daerah agar :

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

- a. telah terlebih dahulu menguploadkan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 di sakato plan
  - b. membawa laporan realisasi Keuangan DPA Tahun 2024 kondisi terakhir (*softcopy*)
  - c. membawa Rancangan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 (*softcopy*)
  - d. telah menyusun rencana rasioalisasi anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan Tahun 2024
6. Verifikasi dilaksanakan sebagaimana jadwal terlampir, permohonan pembahasan diluar jadwal tidak akan dilakukan, untuk itu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk hadir dan menugaskan personel yang kompeten untuk mengambil keputusan.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
- a. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) yakni Sdr. Andre Ola (HP/WA. 0812-6769-710)
  - b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EKOSDA) yakni Sdr. Benny Sakti (HP/WA. 0812-6746-4698)
  - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) yakni Sdri. Rahmi Laila (HP/WA. 0853-6559-4174)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT



Drs. HANSASTRI, M.M.  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196410131991031001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## Lampiran I

### Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
12. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat
18. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
20. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
22. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
23. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
25. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
26. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
27. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
28. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
29. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
33. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
34. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
36. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
37. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
38. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
39. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
40. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat
41. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat
42. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat
43. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat
44. Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat
45. Kepala Biro Umum Provinsi Sumatera Barat
46. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat
47. Direktur RSAM Bukittinggi
48. Direktur RSUD M. Natsir Solok
49. Direktur RSJ HB Saanin Padang
50. Direktur RSUD Pariaman
51. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**JADWAL PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DAN PERUBAHAN TAHUN 2024 LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tanggal : 13 sd. 20 Mei 2024

Tempat :

1. Kelompok PPM 1 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kelompok PPM 2 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Kelompok PPM 3 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Kelompok PPM 4 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
5. Kelompok PPM 5 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

NO	JADWAL DAN WAKTU	SKPD KELOMPOK PPM 1	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 1	SKPD KELOMPOK PPM 2	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 2	SKPD KELOMPOK PPM 3	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 3	SKPD KELOMPOK PPM 4	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 4	SKPD KELOMPOK PPM 5	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 5
<b>Senin, 13 Mei 2024</b>											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Inspektorat	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas, P2P)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas PMD	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Badan Kepegawaian Daerah	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Dinas Kominfotik	1. Lidya Febrina 2. Teddy Rafdianto 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Julfi Arfan 8. Ishak
<b>Selasa, 14 Mei 2024</b>											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang Yanikes BKIM, PARU, LAPKES)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Sosial	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas Kebudayaan	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak

Rabu, 15 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Elfi Endri, 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang SKD BKOM PELKES, Sekretariat)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMK dan Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro.Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Bappeda	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Badan Kesbangpol	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
Kamis, 16 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Badan Litbang	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. RSJ HB Sa'anin 2. RSUD M. Natsir Solok	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMK, dan Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro.Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Sekretariat DPRD	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
Jum'at, 17 Mei 2024											
	08.00 sd. 12.30 Wib	1. Biro Organisasi	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. RSUD Pariaman 2. RSAM Bukittinggi	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMA SLB Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro.Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. BPSDM	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Badan Penghubung	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro.Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
	13.30 sd. 16.00 WIB	2. Biro Pemerintahan dan Otda									
Senin, 20 Mei 2024											
	08.00 sd. 12.30 Wib	1. Biro Hukum	1. Elfi Endri 2. BPKAD	1. Biro Umum	1. Nasrial 2. BPKAD	1. Dinas Pendidikan	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin	1. Biro Kesra	1. Ria Oktorina 2. BPKAD		1. Lidya Febrina 2. BPKAD

	13.30 sd. 16.00 WIB	2. Biro Adm Pimpinan	3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni		3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	(Bidang SMA SLB Bidang Sapras)	3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara		3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Biro Adm. Pembangun an	3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
<b>Selasa, 20 Mei 2024</b>											
	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kependudukan dan Capil	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (GDTK dan Sekretariat dan Cabang Dinas)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas P2AP2KB	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal		



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**  
Nomor : 5 /V/PPM5/Bappeda-2024

**Dasar pelaksanaan kegiatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

**Pelaksanaan Kegiatan :**

Hari / Tanggal : Senin, 20 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

**Objek Verifikasi :**

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025**
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) **Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024**
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 sebagaimana daftar hadir pada lampiran 1 Berita Acara ini.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategis 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai

sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Desy Herzucht	Ko Organisasi	1. 
2	Lidya Febrina	Bappeda.	2. 
3	JUMFI ARFANI	Bappeda	3. 
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Laura Nurwinda	FTU	1. 
2	Febri f	JFT	2. 
3	Rahmi Dars	Ambis	3. 
4	Yonah E f	Andic	4. 
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

## Contoh : Notulen



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

**NOTULEN PEMBAHASAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024 LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
PADA TANGGAL 13 SD. 29 MEI 2024 (PPM-5)**

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/41/V/P2EPD/BAPPEDA-2024 tanggal 2 Mei 2024, tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Senin sd. Rabu / 13 sd. 29 Mei 2024 Bertempat di Ruang Rapat Lt. II. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Koordinator Tim Pembahasan/Verifikasi Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kepala Bidang PPM, dan Fungsional Perencana Lingkup Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat)
Peserta Rapat Koordinasi	: 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat (Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro PBJ) 2. Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	: Pembahasan/Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat
Arahan/ Penyampaian Informasi	1. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan pada tanggal 13 sd. 22 Mei 2024 berdasarkan a) Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah, dengan penelaahan pada masing-masing rincian belanja pada RKA Sub Kegiatan yang telah diinput kedalam SIPD RI, b). Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKP dan Program Strategis Nasional 2. Pembahasan/Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKP Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKP Provinsi Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan pembahasan dan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan Perangkat Daerah.</li> <li>4. Beberapa hal yang menjadi catatan pembahasan, apakah usulan sub kegiatan mendukung Program Unggulan, SPM, DAK, Pokir, Mandatori Pusat, Direktif, IKU/IKD, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan beberapa arahan pimpinan lainnya.</li> <li>5. Selain itu verifikasi juga dilakukan terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, untuk :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)</li> <li>b. Tindaklanjut terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023</li> <li>c. Penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah</li> <li>d. Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024</li> <li>e. Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024</li> <li>f. Tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024</li> </ol> </li> <li>6. Mekanisme Pembahasan dilakukan melalui System Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI dan Sakato Plan sesuai dengan Usulan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 yang telah diinput.</li> <li>7. Alat Bantu Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 antara lain Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.</li> <li>8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Nomor 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 17 Mei</li> </ol>
--	---

	<p>2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.</p> <p>9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 00.7/41/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sumatera Barat.</p>
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adapun hasil Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat disepakati dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing anggota tim dan perangkat daerah, sebagaimana berita acara terlampir.</li> <li>2. Hasil Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang telah disepakati untuk dilakukan penyempurnaan entry kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.</li> </ol>

Notulis

Lidya Febrina, S.Pt, MP

## DOKUMENTASI

**DOKUMENTASI PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL 13 SD. 28 MEI 2024 (KELOMPOK PPM I)**

**1. Inspektorat tanggal 13 Mei 2024 :**



**2. Dinas Pemuda dan Olah Raga tanggal 14 Mei 2024 :**



**3. Satuan Polisi Pamong Praja dan tanggal 15 Mei 2024:**



**DOKUMENTASI VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BAPPEDA TAHUN 2023 (KELOMPOK D)**

**1. BKD, tanggal 3 Mei 2023**



**2. BKPSDM, tanggal 3 Mei 2023**



**3. Dinas Kebudayaan, tanggal 4 Mei 2023**



**4. Biro Kesra, tanggal 4 Mei 2023**



**5. Dinas P3AP2KB, tanggal 5 Mei 2023**



**6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 8 Mei 2023**



**DOKUMENTASI VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BAPPEDA TAHUN 2023 (KELOMPOK E)**

1. Badan Penghubung, tanggal 3 Mei 2023



2. Inspektorat, tanggal 4 Mei 2023



3. Biro Administrasi Pimpinan, tanggal 4 Mei 2023



**5. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tanggal 17 Mei 2024 :**



**6. Biro Hukum, tanggal 20 Mei 2024 :**



**7. Biro Administrasi Pimpinan, tanggal 20 Mei 2024 :**



**8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal 21 Mei 2024 :**



**9. Biro Organisasi, tanggal 21 Mei 2024**



**10. Biro Hukum, tanggal 22 Mei 2024**



**11. Biro Administrasi Pimpinan, tanggal 22 Mei 2024**



**12. Badan Pengembangan dan Penelitian, tanggal 28 Mei 2024**



**13. Inspektorat, tanggal 28 Mei 2024**



**14. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tanggal 28 Mei 2024**



# VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

## BERITA ACARA

### PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : /V/PPM1/Bappeda-2024

#### Dasar pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

#### Pelaksanaan Kegiatan :

Hari / Tanggal : Senin, 13 sd. Senin, 20 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I, II dan III Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### Objek Verifikasi :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Satuan Polisi Pamong Praja** Tahun 2025

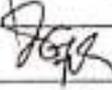
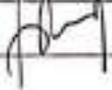
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) **Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024**
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 sebagaimana daftar hadir pada lampiran 1 Berita Acara ini.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.
  - h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Elpi Endu	Berpada	1. 
2	Sanni Yum	Pajit	2. 
3	Dobi Andriyani	BPKAD	3. 
4	Dasy Herawati	120 Organisasi	4. 
5	Farrah	Inspektoral	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS : Satuan Polisi Pamong Praja			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

## LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Uru Pem	Keterangan
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.952.241.000	0	7.952.241.000												
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.952.241.000	0	7.952.241.000												
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.033.000.000	0	7.033.000.000												
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0	3.000.000												
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Sub kegiatan menampung Penyusunan dan Perubahan Dokren 2. Rincian Belanja yang dianggarkan untuk pencapaian target sub kegiatan
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali untuk pencapaian target sub kegiatan
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali untuk pencapaian target sub kegiatan
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.002.000.000	0	7.002.000.000												
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.000.000.000	0	7.000.000.000											V	1. Penuhi penganggaran gaji dan Tunjang ASN untuk 1 tahun anggaran
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	0	3.000.000												
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	0	2.000.000												
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.000.000	0	9.000.000												
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Uru Pem	Keterangan
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	0	1.000.000												1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali dengan kebutuhan pencapaian target ouput
<b>1.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>												
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	0	1.000.000												1. Pengadaan Kendaraan dinas tidak diperbolehkan
1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.000.000	0	1.000.000												2Belanja modal alat besar dihilangkan
1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000	0	1.000.000												1. Sub kegiatan dihilangkan saja
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian Belanja disesuaikan kembali dengan targe kegiatan
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Direncanakan untuk pengadaan komputer, printer 2. Rincian belanja disesuaikan kembali. 3. Usulan dimasukkan dalam RKBMD
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian Belanja disesuaikan kembali
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>												
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali 2. Penyediaan jasa listrik dan Air dianggarkan untuk 1 tahun
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Untuk mengakomodir honor PTT, supir, CS, 2. Rincian belanja disesuaikan kembali
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000	0	4.000.000												
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan dengan pencapaian target
1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	0	1.000.000												1. Sub kegiatan dihilangkan
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	0	1.000.000												1. Rincian kegiatan disesuaikan kembali
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	0	1.000.000											V	1. Rincian belanja disesuaikan kembali
<b>01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>357.000.000</b>	<b>0</b>	<b>357.000.000</b>												
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>305.000.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000.000</b>												
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	0												1. Sub kegiatan belum dientry
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan	1.000.000	0	1.000.000		V										1. Rincian belanja diperbaiki

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Uru Pem	Keterangan
																2. Penuhi dulu anggaran Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat karena merupakan pendukung SPM Trantibum
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	50.000.000	0	50.000.000		V							V	V		1. Kegiatan berupa pelatihan, target 50 orang, target satlimas Kabupaten/ Kota 2. Rencana dilaksanakan di kabupaten/kota, digilir tetapi memakai gedung di Kabupaten/ Kota 3. Rincian belanja disesuaikan untuk pencapaian target
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1.000.000	0	1.000.000									V			1. Rincian belanja sub kegiatan disesuaikan kembali untuk pencapaian target
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan	1.000.000	0	1.000.000		V								V	V	1. Membeli peralatan untuk trantibum (tameng) 2. Rincian sub kegiatan diperbaiki, karena sub kegiatan adalah SPM merupakan skala prioritas penuhi dulu anggaran untuk sub kegiatan ini
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,	1.000.000	0	1.000.000		V							V	V		1. Sub kegiatan mendukung SPM 2. Agar penganggaran sub kegiatan menjadi prioritas, Rincian belanja diperbaiki kembali
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	1.000.000	0	1.000.000		V							V	V		1. Sub kegiatan mendukung SPM 2. Agar penganggaran sub kegiatan menjadi prioritas, Rincian belanja diperbaiki kembali
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	50.000.000	0	50.000.000		V							V	V		1. Sub kegiatan SPM Trantibum 2. Mengakomodir rapat satlimas se Kabupaten/Kota di Sumbar 3. Rincian belanja yang dianggarkan harus yang mendukung pencapaian output target. 4. Kegiatan dilaksanakan saja di Kota Padang 5. Ada penganggaran Perjalanan Dinas yang ditujukan untuk updating data Satlinmas
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0	0	0									V	V		1. Rincian Belanja sub kegiatan belum diinputkan
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	0	0	0		V							V	V		1. Rincian belanja belum diinputkan
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	200.000.000	0	200.000.000		V							V	V		1. Kegiatan berupa operasi kelapangan jika ada gangguan dan penyelesaian 2. Rincian belanja dianggarkan untuk pencapaian target output
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000.000</b>												
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	50.000.000	0	50.000.000		V							V	V		1. Kegiatan berupa meninjau kelapangan penerapan Perda dan Pergub ke Kabupaten/ Kota 2. Rincian belanja disesuaikan untuk pencapaian target output
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0	0	0		V							V	V		1. Sub kegiatan pendukung SPM

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Uru Pem	Keterangan
																2. Rincian belanja bleum diinputkan
1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang	1.000.000	0	1.000.000												1. Sub kegiatan ini muncul sbagai tindak lanjut penanganan kasus 2. Kebutuhan sebenarnya membuat ruang baru, tetapi anggaran belum mencukupi
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.000.000	0	1.000.000		V							V	V		1. Sub kegiatan untuk mendukung SPM  2. Agar anggaran dipenuhi dulu karena prioritas untuk SPM
<b>1.05.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0	0		V							V	V		1. Sub kegiatan pendukung SPM 2. Agar dipenuhi anggarannya karena priorias.
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0	0	0									V	V		1. Rincian belanja belum diinputkan
01.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	562.241.000	0	562.241.000												
<b>1.05.04.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>422.794.000</b>	<b>0</b>	<b>422.794.000</b>												
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	330.440.000	0	330.440.000									V	V		1. Kegiatan berupa bimtek dengan target peserta Kabupaten/ Kota. 2. Kegiatan dilaksanakan di gedung pertemuan pemerintah saja, jangan di hotel karena bukan termasuk kegiatan skala nasional 3. Perjalanan dinas agar digeser ke sub kegiatan yang prioritas (SPM yang perlu penambahan anggaran.
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	92.354.000	0	92.354.000									V	V		1. Mengakomodir untuk pemutakhiran daerah rawan dan peta rawan 2. Updating dilakukan dengan pengambilan data langsung ke Kabupaten/ Kota 3. Mengakomodir Rakor Damkar 4. Rincian belanja yang dianggarkan harus untuk pencapaian target ouput.
<b>1.05.04.1.02</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>139.447.000</b>	<b>0</b>	<b>139.447.000</b>												
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	139.447.000	0	139.447.000									V	V		1. Kegiatan dipindahkan ke gedung pertemuan pemerintah, tidak dilaksanakan di Hotel 2. Pelaksanaan kegiatan di laksanakan saja di Kota Padang. 3. Perjalanan dinas dan sewa hotel agar dipindahkan ke sub kegiatan prioritas (SPM) yang masih kekurangan anggaran

**LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
1.05.0.00.0.00.01.0000	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	18.059.063.496	(25.000.000)	18.034.063.496	
1,05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	18.059.063.496	(25.000.000)	18.034.063.496	
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	12.773.814.691	(1.096.000)	12.772.718.691	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	-	260.000.000	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-	100.000.000	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000	-	70.000.000	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	-	90.000.000	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.133.849.958	-	10.133.849.958	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.601.658	-	9.987.601.658	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.465.900	-	126.465.900	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.782.400	-	19.782.400	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71.689.400	-	71.689.400	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.760.000	-	53.760.000	
1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.956.500	-	7.956.500	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.972.900	-	9.972.900	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.744.000	(1.096.000)	228.648.000	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.740.000	(1.096.000)	189.644.000	Sisa pengadaan pakaian dinas beserta atribut Rp.1.096.000
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.004.000	-	39.004.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	934.103.947	-	934.103.947	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.100	-	3.170.100	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.604.700	-	37.604.700	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.794.000	-	23.794.000	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.535.147	-	869.535.147	
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.454.700	-	97.454.700	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	
1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	
1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.219.700	-	25.219.700	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.235.000	-	72.235.000	
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.222.686	-	794.222.686	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-	4.000.000	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.363.159	-	105.363.159	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.859.527	-	684.859.527	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.750.000	-	252.750.000	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.500.000	-	223.500.000	
1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.850.000	-	16.850.000	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.000	-	12.400.000	
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	5.210.248.805	(23.904.000)	5.186.344.805	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.880.248.805	(23.904.000)	4.856.344.805	
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	-	-	
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	75.000.000	-	75.000.000	Bentuk kegiatan mengadakan pelatihan sekali 30 org utk satlinmas berlokasi di Sawahlunto
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	-	-	-	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	-	-	-	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.718.687.457	(23.904.000)	1.694.783.457	Pelaksanaan HUT SatpolPP, Acara ini sdh dilaksanakan pada bulan Februari, realisasi saat ini 58% (Bulan Mei). Terdapat Sisa dari kegiatan HUT Satpol PP Rp.23.904.000,-
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	-	5.000.000	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.000.000	-	75.000.000	Bentuk pelaksanaan sosialisasi, dg mengumpulkan Kab/Kota masing2 kab/kota 3 org. Akan dilakukan bulan Mei. sekaligus mensukseskan Pemilu
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.806.561.348	-	2.806.561.348	Kegiatan berupa pengawalan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Tamu VIP, event Nasional. kegiatan patroli/ deteksi dini,
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-	-	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	200.000.000	-	200.000.000	Kegiatan meliputi Penindakan terhadap gangguan Trantibum, penegakan Perda dan PerkadaProvinsi, serta pengamanan apabila terjadi unjuk rasa. Realisasi hingga Bulan Mei 13,64%
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	200.000.000	-	200.000.000	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.000.000	-	50.000.000	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000	-	100.000.000	Contohnya pada kasus tambang bekerjasama dengan DLH dan ESDM. Penanganan pada kasus maksiat dll
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	50.000.000	-	50.000.000	Bentuk kegiatan, koordinasi ke daerah tentang tugas2 atau sejauh mana proses penyelesaian penyidik
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	130.000.000	-	130.000.000	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	80.000.000	-	80.000.000	
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	50.000.000	-	50.000.000	Agar output kegiatan diperhatikan dan disesuaikan dengan uraian belanja
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	-	-	
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	75.000.000	-	75.000.000	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	75.000.000	-	75.000.000	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	75.000.000	-	75.000.000	Sedang proses pendataan, dan pembuatan aplikasi bekerjasama dengan Diskominfo. Diharapkan dapat menjaikan peta rawan kebakaran yang berpotensi mudah terjadinya kebakaran Usulan untuk pengadaan mobil Damkar
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	

Pembahas (Bappeda)

Perwakilan SKPD



## **BERITA ACARA**

### **PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Nomor : 6 /V/PPM5/Bappeda-2024**

#### **Dasar pelaksanaan kegiatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/W/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

#### **Pelaksanaan Kegiatan :**

Hari / Tanggal : Senin, 13 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

### **Objek Verifikasi :**

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025**
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024**
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

### **Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 sebagaimana daftar hadir pada lampiran 1 Berita Acara ini.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai

sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Lidya Febrina	Bappeda	1.
2	Rani Iskasoni	Biro Organisasi	2.
3	JULFI ARIAN	Bappeda	3.
4	ANDER OLA VETRA		4.
5	FEDDI		5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Eko Faizal	Kabid	1.
2	Yandi	JFT	2.
3	Ira Nia Sanita	Prakom	3.
4	Yola Tri Handika	Prakom	4.
5	Agamas Safitza	Prakom	5.
6	Desi Marlinda	sekretaris	6.
7	Odi. F. Sapho	Subkordinator	7.
8	TERDI	EKO-SPT	8.
9			9.
10			10.

## LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

#### PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	37.362.084.000	-1.578.100.058	35.792.773.942	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35.587.084.000	-1.193.646.500	34.402.227.500	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.736.084.000	286.353.500	18.022.437.500	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	481.500.000	-190.500.000	291.000.000	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	0	150.000.000	1. Pelaksanaan kegiatan Forum OPD 2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran 3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	0	6.000.000	Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran

2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	0	25.000.000	<p>1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>
2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	0	25.000.000	<p>1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>
2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-100.000.000	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Sudah terakomodir pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (pilih 1 sub kegiatan saja untuk mengakomodir pelaksanaan forum OPD)
2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	90.500.000	-90.500.000	0	<p>1. Sub kegiatan ini dihilangkan</p> <p>2. Sudah diakomodir di kegiatan statistik</p>
2.16.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	0	0	0	
2.16.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target	30.000.000	0	30.000.000	<p>1. Pedomani Definisi Operasional (DO) Sub Kegiatan</p> <p>2. Belanja BBM dipindahkan ke sub kegiatan lain karena tidak ada perjalanan dinas dalam daerah</p>

					3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	55.000.000	0	55.000.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.977.584.000	0	10.977.584.000	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.447.584.000	0	10.447.584.000	Agar dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan 1 tahun anggaran (Kebutuhan gaji berdasarkan hasil rekon bersama BPKAD)
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	470.000.000	0	470.000.000	1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran 2. Rasionalisasikan belanja perjalanan dinas dan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.000.000	0	60.000.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	190.000.000	0	190.000.000	

2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	160.000.000	0	160.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	0	30.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	431.000.000	0	431.000.000	
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.500.000	0	112.500.000	Pengadaan pakaian agar menyesuaikan jumlah pegawai yang ada
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.500.000	0	23.500.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	295.000.000	0	295.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.028.544.970	707.000.000	2.735.544.970	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	0	25.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.760.680	0	178.760.680	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	5.000.000	50.000.000	1. Penambahan anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 5 juta

					2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	0	30.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.860.000	0	22.860.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.726.924.290	0	1.726.924.290	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	702.000.000	702.000.000	Kebutuhan belanja sub kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 tahun anggaran
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.042.850.900	-225.146.500	817.704.400	
2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	642.704.400	0	642.704.400	1. Dipindahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 642.704.400 2. Dibuatkan sub rekening baru dan ditagging rincian belanjanya
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	200.146.500	-175.146.500	25.000.000	Anggaran dikurangi menjadi 25.000.000
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	1. Dibuatkan rincian belanja sub kegiatan 2. Dikurangi sebesar 50.000.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.084.604.130	-5.000.000	2.079.604.130	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-5.000.000	0	Sub kegiatan dipindahkan ke logistik kantor

2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.000.000	0	993.000.000	Kebutuhan belanja sub kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 tahun anggaran
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.086.604.130	0	1.086.604.130	Kebutuhan belanja sub kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 tahun anggaran
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	0	500.000.000	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	0	200.000.000	Kebutuhan belanja sub kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 tahun anggaran
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	0	100.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000	Agar penyusunan rencana anggaran bangunan/pemeliharaan fisik diperlukan konsultasi dengan pejabat pengadaan Dinas dan Biro PBJ
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	5.500.000.000	-1.304.500.000	4.195.500.000	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5.500.000.000	-1.304.500.000	4.195.500.000	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	250.000.000	-46.000.000	204.000.000	Belanja jasa peliputan media dipindahkan ke sub kegiatan Penyusunan Konten
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	900.000.000	-363.500.000	536.500.000	1. Jasa tenaga IT dipindahkan ke Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD sebesar Rp409.000.000,- 2. Ditambahkan anggaran sebesar 46.000.000 yang berasal dari pemindahan anggaran Belanja Jasa Peliputan Media di Sub Kegiatan Relasi Media

					3. Disarankan ada pembuatan konten animasi kartun dari kominfo dengan kolaborasi dengan OPD dan lintas sektor terkait
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	250.000.000	-240.000.000	10.000.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi menjadi 10.000.000 2. Bentuk kegiatan diadakan dalam bentuk zoom meeting
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	250.000.000	-230.000.000	20.000.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi menjadi 20.000.000 2. Bentuk kegiatan diadakan dalam bentuk zoom meeting
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	450.000.000	-425.000.000	25.000.000	1. Sasaran sub kegiatan bukan termasuk tugas dan fungsi Diskominfo 2. Anggaran sub kegiatan dikurangi menjadi 25.000.000 3. Bentuk kegiatan diadakan dalam bentuk zoom meeting
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	125.000.000	0	125.000.000	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.850.000.000	0	1.850.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	125.000.000	0	125.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	300.000.000	0	300.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran

2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	200.000.000	0	200.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	800.000.000	0	800.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	12.351.000.000	-175.500.000	12.184.290.000	Kegiatan yang dilakukan untuk dapat mendukung pencapaian target Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJP Nasional dan Provinsi Sumatera Barat : Indeks SPBE dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	91.781.000	0	91.781.000	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	91.781.000	0	91.781.000	1. Bentuk keluaran sub kegiatan adalah pengelolaan domain sumbarprov.go.id, tidak logis ada perjalanan dinas, agar belanja perjalanan dinas dihilangkan 2. Perpanjangan nama domain tidak ada 3. Narasumber via zoom saja
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	12.259.219.000	-175.500.000	12.092.509.000	
2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	0	0	0	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	75.431.000	-20.000.000	55.431.000	1. Tempat penyelenggaraan kegiatan agar dipindahkan ke Padang sehingga belanja sewa gedung agar dihilangkan, dan anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain

					<p>2. Belanja perjalanan untuk koordinasi dengan kab/kota agar dipindahkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p> <p>3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p> <p>4. Belanja perjadi dikurangi 20.000.000</p>
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau revidi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	21.000.000	(8.790.000)	21.000.000	<p>1. Perjalanan dinas utk melakukan koordinasi dengan kab/kota</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas utk koordinasi dengan kab/kota agar dipindahkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p> <p>3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100.000.000	-19.950.000	80.050.000	<p>1. Belanja perjalanan utk koordinasi dengan kab/kota agar dipindahkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p>

					<p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi</p> <p>3. Belanja perjadiin dikurangi 19.950.000</p>
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	612.592.431	0	612.592.431	<p>1. Belanja honor, pakaian, makan minum dan evaluasi , tenaga IT agar dipindahkan ke sub kegiatan Dukungan pelaksanaan SPBE pada perangkat daerah</p> <p>2. Belanja lisensi agar disesuaikan dengan kebutuhan bidang</p> <p>3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	50.000.000	0	50.000.000	<p>1. Satuan target keluaran agar disesuaikan</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi</p> <p>3. Rincian belanja makan/minum agar disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan</p>
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	250.000.000	0	250.000.000	<p>1. Pemerintah provinsi terhubung dengan kabupaten/kota</p> <p>2. Agar memperhatikan efisiensi pemanfaatan oleh kab/kota terhadap portal data yang disediakan pemprov</p>

					3. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	50.000.000	0	50.000.000	a. Bentuk kegiatan merupakan kontrol aplikasi virtualisasi
					b. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	81.016.300	0	81.016.300	1. Bentuk kegiatan baru tahap sosialisasi pemanfaatan portal pelayanan daerah 2. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	100.000.000	0	100.000.000	1. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi  2. Belanja perjalanan dinas agar dikurangi dan dipindahkan utk kebutuhan belanja lain 3. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	50.000.000	0	50.000.000	Agar dikoordinasikan dengan Kemendagri tentang 8 manajemen SPBE
2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	75.000.000	0	75.000.000	1. Bentuk kegiatan berupa audit internal aplikasi dan infrastruktur dengan menggunakan tools BRIN karena ketiadaan SDM pada inspektorat

					2. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
					3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	90.000.000	0	90.000.000	
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	8.400.000.000	-175.500.000	8.224.500.000	1. Belanja jasa tenaga IT dipindahkan ke sub kegiatan pelaksanaan dukungan SPBE 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	40.000.000	0	40.000.000	1. Target keluaran (KemenPAN) agar disesuaikan menjadi 5 aplikasi umum 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	35.000.000	48.740.000	83.740.000	1. Agar dikoordinasikan dengan Kemendagri terkait DO sub kegiatan 2. Perjalanan dinas dari sub kegiatan lain terkait koordinasi agar dipindahkan ke sub kegiatan ini
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	979.179.269	0	979.179.269	Belanja lisensi SSL agar dipindahkan ke rincian belanja sewa peralatan komputer lainnya

2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1.250.000.000	0	1.250.000.000	Target keluaran disesuaikan menjadi 52 OPD
2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	875.000.000	-50.000.000	825.000.000	
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	875.000.000	-50.000.000	825.000.000	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	875.000.000	-50.000.000	825.000.000	
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	325.000.000	0	325.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bimtek terhadap petugas statistik di OPD lingkup pemprov sumbar dan nagari statistik di kabupaten/kota</li> <li>2. Target output disesuaikan kembali menjadi 300 orang</li> <li>3. Koefisien peserta pada belanja makan minum disesuaikan kembali</li> <li>3. Belanja BBM dianggarkan namun belanja perjalanan dinas tidak ada, disesuaikan kembali belanja BBM berdasarkan perjalanan dinas yang dilaksanakan</li> <li>4. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</li> <li>5. Bappeda saat ini sedang membangun aplikasi SIGAMAD, satu data untuk nagari/desa/kelurahan, kominfo diharapkan ikut melakukan atensi terkait dengan data statistik sektoral yang akan ditagging pada aplikasi SIGAMAD terkait nagari</li> </ol>

2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	<p>1. Pengumpulan bahan dan data-data PDRB dari 11 OPD untuk diverifikasi dengan BPS, rilis per triwulan Sumatera Barat Dalam Angka</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p> <p>3. Rasionalisasi anggaran pada sub kegiatan sebesar 100 juta</p>
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100.000.000	100.000.000	200.000.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	100.000.000	0	100.000.000	<p>1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	<p>1. Dikaji kembali terkait pengumpulan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</p> <p>2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</p>

2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	900.000.000	-334.453.558	565.546.442	
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	900.000.000	-334.453.558	565.546.442	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	800.000.000	-306.711.558	493.288.442	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000	-35.000.000	65.000.000	1. Pengurangan anggaran kegiatan sebesar 35 Juta 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	150.000.000	-41.511.558	108.488.442	1. Pengadaan laptop dihilangkan karena jumlah laptop sudah banyak dikominfo melebihi jumlah aparatur kominfo, lakukan pengusulan penghapusan dari total aset kominfo terlebih dahulu 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	300.000.000	-117.000.000	183.000.000	1. Jasa tenaga IT dipindahkan ke sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 117.000.000

					2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	250.000.000	-113.200.000	136.800.000	1. Pengadaan laptop dihilangkan karena jumlah laptop sudah banyak di kominfo melebihi jumlah aparatur kominfo, lakukan pengusulan penghapusan dari total aset kominfo terlebih dahulu 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	100.000.000	-27.742.000	72.258.000	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000	-27.742.000	72.258.000	1. Pengadaan laptop dihilangkan karena jumlah laptop sudah banyak di kominfo melebihi jumlah aparatur kominfo, lakukan pengusulan penghapusan dari total aset kominfo terlebih dahulu 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	33.927.002.036	575.724.343	34.502.726.379	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.945.002.036	633.572.343	33.578.574.379	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.285.020.873	19.410.000	14.304.430.873	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.071.900	0	293.071.900	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.900.000	0	156.900.000	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.391.200	0	39.391.200	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.780.700	0	96.780.700	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.508.919.566	0	9.508.919.566	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.053.739.328	0	9.053.739.328	Kekurangan gaji 125.202.292 agar dicarikan dari rasionalisasi sub kegiatan Diskominfo
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.620.238	0	400.620.238	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.560.000	0	54.560.000	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	187.004.750	0	187.004.750	
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	159.862.000	0	159.862.000	
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.142.750	0	27.142.750	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.248.000	-50.000.000	96.248.000	

2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.248.000	-50.000.000	96.248.000	Dikurangi anggaran 50.000.000
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.715.002.852	0	1.715.002.852	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.925.400	0	28.925.400	Penyediaan alat listrik agar memperhatikan ketersediaan garansi barang
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.861.780	0	26.861.780	
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.996.800	0	34.996.800	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.799.800	0	39.799.800	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.860.000	0	22.860.000	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.561.559.072	0	1.561.559.072	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.567.600	33.580.000	125.147.600	
2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	91.567.600	-30.000.000	61.567.600	1. Anggaran dikurangi 30.000.000 2. Sisanya untuk kebutuhan mebel P3K
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	63.580.000	63.580.000	Usulan penambahan anggaran untuk pembelian: 1. Drone 1 unit Rp26.580.000,- 2. Laptop 1 unit Rp17.000.000,- 3. Tablet 1 unit Rp20.000.000,-
2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.581.205	0	1.901.581.205	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	5.000.000	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.001.500	0	993.001.500	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.579.705	0	903.579.705	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.625.000	35.830.000	477.455.000	

2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.745.000	0	205.745.000	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.430.000	35.830.000	88.260.000	Ditambahkan anggaran pemeliharaan AC sebesar 35.830.000 yang berasal dari pemindahan anggaran pemeliharaan AC di sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.450.000	0	183.450.000	
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	7.219.603.495	1.084.023.603	8.303.627.098	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.219.603.495	1.084.023.603	8.303.627.098	
2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	14.994.400	0	14.994.400	
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	197.100.000	0	197.100.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	14.900.000	0	14.900.000	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	739.215.300	0	739.215.300	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.001.573.237	1.134.023.603	5.135.596.840	1. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi 2. Penambahan hibah KPID sebesar Rp1.134.023.603,-

2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	181.000.000	-10.000.000	171.000.000	1. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
					2. Belanja perjalanan dinas dikurangi 10.000.000
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	87.558.200	0	87.558.200	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	29.745.000	0	29.745.000	
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	10.820.500	0	10.820.500	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	25.757.000	0	25.757.000	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.845.439.858	-20.000.000	1.825.439.858	1. Perjalanan dinas dikurangi 20.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	71.500.000	-20.000.000	51.500.000	1. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi 2. Sewa hotel dikurangi 20.000.000
					3. Sewa hotel dipindahkan ke makan/ minum 20.000.000 utk penyelenggaraan kegiatan di gedung pemerintah, sesuai SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	11.440.377.668	-469.861.260	10.970.516.408	

2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	9.661.870.037	-410.646.960	9.251.223.077	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.050.000	-4.000.000	47.050.000	Belanja lisensi dikurangi 4.000.000
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.610.820.037	-406.646.960	9.204.173.077	1. Sisa belanja internet dihilangkan sebesar 308.075.200 2. Belanja pemeliharaan komputer personal dikurangi 14.600.000 3. Belanja modal peralatan jaringan dikurangi : - router menjadi 5 unit x 6.325.000 = 31.625.000  - switch low menjadi 5 unit x 4.556.205 = 22.781.025 - acces point menjadi 5 unit x 5.913.147 = 29.565.735 Total pengurangan 406.646.960 3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.778.507.631	-59.214.300	1.719.293.331	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	99.859.400	-20.000.000	79.859.400	1. Perjalanan dinas dikurangi 20.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	35.207.900	0	35.207.900	1. Target utk tahun 2025 seharusnya sdh ada peta terintegrasi SPBE d Sumbar
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	817.663.000	-39.214.300	778.448.700	1. Belanja pemeliharaan AC dpindahkan ke Sekretariat 35.830.000

					2. Belanja pemeliharaan komputer (SSD) dihapus 3 unit x 1.128.100 = 3.384.300 Total pengurangan 39.214.300
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	0	
2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	0	0	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	749.635.731	0	749.635.731	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	28.362.300	0	28.362.300	
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	47.779.300	0	47.779.300	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0	0	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>465.000.000</b>	<b>-20.348.000</b>	<b>444.652.000</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>465.000.000</b>	<b>-20.348.000</b>	<b>444.652.000</b>	
<b>2.20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>465.000.000</b>	<b>-20.348.000</b>	<b>444.652.000</b>	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	152.000.000	-5.000.000	147.000.000	1. Anggaran dikurangi 5.000.000

					2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	174.000	-174.000	0	Sub kegiatan dan target dihilangkan
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	29.751.800	-5.000.000	24.751.800	1. Anggaran dikurangi 5.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	180.763.700	-5.000.000	175.763.700	1. Anggaran dikurangi 5.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	174.000	-174.000	0	Sub kegiatan dan target dihilangkan
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	102.136.500	-5.000.000	97.136.500	1. Anggaran dikurangi 5.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	517.000.000	-37.500.000	479.500.000	
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	517.000.000	-37.500.000	479.500.000	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	452.000.000	-35.000.000	417.000.000	

2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	65.000.000	-7.500.000	57.500.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi 7.500.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	95.000.000	0	95.000.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	177.000.000	-20.000.000	157.000.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi 20.000.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	115.000.000	-7.500.000	107.500.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi 7.500.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	65.000.000	-2.500.000	62.500.000	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	65.000.000	-2.500.000	62.500.000	1. Anggaran sub kegiatan dikurangi 2.500.000 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

---

## **BERITA ACARA**

### **PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

---

Nomor : | /V/PPM5/Bappeda-2024

**Dasar pelaksanaan kegiatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

**Pelaksanaan Kegiatan :**

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat

### **Objek Verifikasi :**

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025**
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024**
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

### **Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai

sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

- h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Erlina	Inspektorat	1.
2	Yunhosro Metya	...	2.
3	Lidya Febrina	Bappeda	3.
4	Desy Hermah	Bim Dgaisai	4.
5	JULFI ARFAN	Bappeda	5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Rahimi Siddiq	Sekretaris	1.
2	Desy Firda	Kepuk Bina	2.
3	Desy Ni Arman	Kepala Bina MG	3.
4	Robi	PLH. Kabid Logika	4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

## LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025

### DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

#### PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16.905.655.000	0	16.905.655.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.712.626.000	0	1.712.626.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.210.470.000	0	1.210.470.000	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.033.470.000	0	1.033.470.000	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	0	200.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran</li> <li>2. Kebutuhan jam lembur pegawai lebih dari 15 jam dalam sebulan, kebutuhan 28 jam per bulan, koordinasikan lebih lanjut dengan BPKAD - saran untuk dilakukan sift bagi pegawai yang akan melaksanakan lembur sehingga jam lembur tidak melebihi dari aturan Pergub</li> <li>3. Belanja alat listrik dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>4. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi</li> </ol>

					5. Rincian belanja BBM perjalanan dinas agar disesuaikan dengan jumlah perjalanan dinas dan anggaran BBM diambilkan dari anggaran perjalanan dinas yang ada
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	59.484.000	0	59.484.000	1. Jumlah pembelian buku ilmu pengetahuan disesuaikan dengan target output kegiatan yaitu sebanyak 250 eksemplar  2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	45.000.000	0	45.000.000	1. Sasaran adalah perpustakaan SMA/SMK/MA di lingkup provinsi yang belum terakreditasi 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	0	40.000.000	1. Bentuk kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas tenaga pustaka SMA/SMK/MA yg belum terakreditasi 2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	0	40.000.000	1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	210.200.000	0	210.200.000	1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran 2. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31.000 utk makan dan 17.000 utk snack

					3. Belanja cetak dan bahan komputer agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	30.000.000	0	30.000.000	1. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran 2. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack
2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	52.500.000	0	52.500.000	Pelaksanaan Survei Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dilaksanakan oleh pihak ke-3
2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	52.500.000	0	52.500.000	1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran (mendukung pencapaian IKU pada RPJMD Prov. Sumbar) 2. Pelaksanaan Survey Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilaksanakan oleh pihak ke-3
2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	35.000.000	0	35.000.000	1. Bentuk kegiatan berupa pemberian pinjaman buku ke pustaka kab/kota 2. Jumlah personil per perjalanan dinas maksimal 3 orang sudah termasuk sopir dengan mempedomami SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	188.786.000	0	188.786.000	1. Pustaka yg dikembangkan yaitu 3 pustaka di kab/kota, dan 2 pustaka SMA di Kota Padang 2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran 3. Perjalanan dinas luar provinsi dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah, dan perjalanan dinas agar mempedomami SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi

					4. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 5. Belanja modal agar disesuaikan dengan standar harga yg berlaku, dan diusulkan RKBMD ke BPKAD
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	35.000.000	0	35.000.000	1. Output sub kegiatan berupa buku profil perpustakaan termasuk perpustakaan desa/nagari/kelurahan 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	45.000.000	0	45.000.000	1. Belanja souvenir agar dialihkan utk kebutuhan belanja lain yang lebih urgen 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	177.000.000	0	177.000.000	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	85.200.000	0	85.200.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Rincian belanja BBM agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku 3. Uraian rincian belanja souvenir agar disesuaikan, penamaan honorium diganti dengan Belanja Suvenir/Cenderamata 4. Belanja perjalanan dinas agar dirasionalisasi dg mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	26.800.000	0	26.800.000	Harga piala sebesar 1 juta agar dirasionalkan, disesuaikan harga/satuannya
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	35.000.000	0	35.000.000	1. Makan/minum rapat agar diuraikan untuk kegiatan bimtek 2. Belanja nasi bungkus agar disesuaikan kembali

2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	0	30.000.000	1. Belanja makan/minum diuraikan untuk kegiatan apa supaya dapat menggambarkan pencapaian indikator keluaran  2. Belanja alat listrik dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	502.156.000	0	502.156.000	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	124.000.000	0	124.000.000	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	119.000.000	0	119.000.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack  2. Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	5.000.000	0	5.000.000	Output sub kegiatan disesuaikan menjadi 3 penerbit
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	121.900.000	0	121.900.000	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	60.900.000	0	60.900.000	Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi

2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	61.000.000	0	61.000.000	1. Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi 2. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	164.800.000	0	164.800.000	
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	79.800.000	0	79.800.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	85.000.000	0	85.000.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	91.456.000	0	91.456.000	
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	55.456.000	0	55.456.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Belanja modal koleksi buku agar disesuaikan dengan jumlah output sub kegiatan
2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	36.000.000	0	36.000.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 untuk snack 2. Rasionalisasikan Belanja bahan komputer, disesuaikan dengan kebutuhan

2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	15.193.029.000	0	15.193.029.000	
2.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	14.659.915.000	0	14.659.915.000	
2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.500.000	0	196.500.000	
2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	0	40.000.000	Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack
2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.500.000	0	55.500.000	1. Belanja modal untuk dipindahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pedomani DO Surat Sekda No.005/60/I/P2EP/Bappeda-2023), dan diusulkan RKBMD ke BPKAD 2. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack
2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.500.000	0	57.500.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.500.000	0	43.500.000	Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack
2.24.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	11.257.000.000	0	11.257.000.000	
2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.997.000.000	0	10.997.000.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran (Kebutuhan gaji berdasarkan hasil rekon bersama BPKAD)
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.000.000	0	175.000.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran

2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	85.000.000	0	85.000.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.865.000	0	102.865.000	
2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.500.000	0	52.500.000	1. Belanja cetak dipindahkan ke kegiatan lain yang kekurangan anggaran 2. Asuransi Kendaraan dinas belum dapat dianggarkan utk 6 unit kendaraan lagi 3. Asuransi gedung belum bisa dianggarkan utk 3 unit gedung lagi 4. Pedomani DO Surat Sekda No.005/60/I/P2EP/Bappeda-2023
2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000	0	21.000.000	1. Belanja ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer agar dirasionalisasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan 2. Pedomani DO Surat Sekda No.005/60/I/P2EP/Bappeda-2023
2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.365.000	0	29.365.000	Rincian belanja ATK, cetak, bahan komputer agar dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan
2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.900.000	0	121.900.000	
2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000	0	54.000.000	Agar dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada
2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.900.000	0	67.900.000	Belanja sewa hotel agar ditambahkan keterangan penggunaannya utk Capacity Building
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.650.000	0	315.650.000	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.500.000	0	27.500.000	Agar rincian belanja menyesuaikan pada Surat Sekda No.005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran

2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	0	12.500.000	Agar rincian belanja menyesuaikan pada Surat Sekda No.005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000	0	32.000.000	Agar rincian belanja menyesuaikan pada Surat Sekda No.005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000	0	21.000.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.500.000	0	20.500.000	Belanja penyediaan bahan bacaan dipindahkan ke sub kegiatan lain
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.850.000	0	191.850.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur no. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal efisiensi dan penghematan belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.300.000	0	10.300.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.960.000	0	57.960.000	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.960.000	0	57.960.000	1. Rincian belanja agar dapat mengacu surat sekda 005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan 1 tahun anggaran 2. Belanja ATK, Kertas, Cetak, dan Bahan Komputer dipindahkan ke sub kegiatan lain yang kekurangan anggaran
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.422.640.000	0	2.422.640.000	
2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.600.000	0	15.600.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	757.040.000	0	757.040.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran

2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.000.000	0	1.650.000.000	Agar dihitung dan disesuaikan dg kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.400.000	0	185.400.000	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.900.000	0	117.900.000	Agar rincian belanja menyesuaikan pada Surat Sekda No.005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.500.000	0	62.500.000	Agar rincian belanja menyesuaikan pada Surat Sekda No.005/60/I/P2EPD/Bappeda-2023, dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan 1 tahun anggaran
2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	0	5.000.000	Belanja cetak agar dipindahkan ke sub kegiatan logistik kantor
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	277.923.000	0	277.923.000	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	148.523.000	0	148.523.000	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	17.500.000	0	17.500.000	Belanja ATK dan kertas disesuaikan dengan kebutuhan
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	15.000.000	0	15.000.000	Belanja modal untuk dipindahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pedomani DO Surat Sekda No.005/60/I/P2EP/Bappeda-2023), dan diusulkan RKBMD ke BPKAD
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	17.500.000	0	17.500.000	1. Belanja ATK disesuaikan dengan kebutuhan 2. Rincian belanja agar menggambarkan pencapaian indikator keluaran
2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	20.000.000	0	20.000.000	1. Arsiparis teladan akan diikuti perlombaan tingkat nasional 2. Harga piala sebesar 1 juta agar disesuaikan harga/satuannya
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	15.000.000	0	15.000.000	Belanja makan/minum agar digabungkan menjadi 2 jenis belanja makan dan snack saja

2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis	7.000.000	0	7.000.000	Bentuk output sub kegiatan berupa buku profil arsiparis
2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	5.000.000	0	5.000.000	Disarankan agar ditambahkan kebutuhan belanja lainnya yg bersumber dari pergeseran anggaran belanja sub kegiatan lainnya
2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	6.523.000	0	6.523.000	Pelaksanaan monev kurang maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas, disarankan agar ditambahkan kebutuhan belanja lainnya yg bersumber dari pergeseran anggaran belanja sub kegiatan lainnya sehingga indikator keluaran tercapai
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	40.000.000	0	40.000.000	Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	5.000.000	0	5.000.000	Output sub kegiatan agar disesuaikan menjadi 10 lembaga
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	92.500.000	0	92.500.000	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	22.500.000	0	22.500.000	1. Belanja ATK, Kertas, Cetak, dan Bahan Komputer disesuaikan dengan kebutuhan 2. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 3. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	22.500.000	0	22.500.000	1. Output sub kegiatan disesuaikan menjadi : Dokumen hasil Wawancara Sejarah Lisan 2. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 3. Belanja modal untuk dipindahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pedomani DO Surat Sekda No.005/60/I/P2EP/Bappeda-2023), dan diusulkan RKBMD ke BPKAD

					4. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	20.000.000	0	20.000.000	1. Output sub kegiatan menjadi : 1 judul buku 2. Belanja makan/ minum rapat disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27.500.000	0	27.500.000	1. Belanja ATK, Kertas, Cetak, dan Bahan Komputer disesuaikan dengan kebutuhan 2. Agar ditambahkan rincian belanja utk pemberian cendera mata bagi pihak yang menyerahkan arsip pribadinya utk disimpan di Dinas Arsip dan Pustaka
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	36.900.000	0	36.900.000	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	23.900.000	0	23.900.000	1. Makan/ minum disesuaikan standar harga yg berlaku, 31,000 utk makan dan 17.000 utk snack 2. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	13.000.000	0	13.000.000	Belanja makan/ minum agar ditambahkan uraiannya
2.24.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	181.313.000	0	181.313.000	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	67.900.000	0	67.900.000	
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	67.900.000	0	67.900.000	1. Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran

					2. Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	57.913.000	0	57.913.000	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	34.000.000	0	34.000.000	1. Bentuk sub kegiatan berupa simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	23.913.000	0	23.913.000	1. Bentuk sub kegiatan berupa aksi langsung ke lapangan terhadap pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	26.000.000	0	26.000.000	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	26.000.000	0	26.000.000	1. Belanja ATK dan kertas disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian output kegiatan 2. Belanja perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur No. 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja, serta memperhatikan tupoksi
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	29.500.000	0	29.500.000	
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	14.500.000	0	14.500.000	1. Belanja makan/ minum agar disesuaikan standar harga yg berlaku, 31.000 utk makan dan 17.000 utk snack

					2. Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah serta memperhatikan tupoksi
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000	0	15.000.000	Belanja perjalanan dinas luar provinsi agar dipindahkan ke Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah serta memperhatikan tupoksi
2.24.04	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	73.878.000	0	73.878.000	
2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	73.878.000	0	73.878.000	
2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	30.878.000	0	30.878.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	43.000.000	0	43.000.000	Rincian belanja harus menggambarkan pencapaian indikator keluaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.882.107.164	-25.000.000	15.857.107.164	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	815.906.000	-9.340.000	806.566.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	515.906.000	-6.340.000	509.566.000	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	434.406.000	-6.340.000	428.066.000	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	60.000.000	0	60.000.000	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	30.000.000	0	30.000.000	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000	0	25.000.000	
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	0	0	0	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	36.300.000	0	36.300.000	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	85.000.000	0	85.000.000	
2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	15.000.000	-1.940.000	13.060.000	Rasionalisasi belanja makan minum rapat sebesar 1.940.000

2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	40.000.000	-2.000.000	38.000.000	Rasionalisasi belanja lembur sebesar 2.000.000
2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	90.000.000	0	90.000.000	
2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	15.000.000	-2.400.000	12.600.000	Rasionalisasi belanja makan minum rapat sebesar 2.400.000
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	38.106.000	0	38.106.000	
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	0	0	0	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	81.500.000	0	81.500.000	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.000.000	0	25.000.000	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0	0	0	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	36.500.000	0	36.500.000	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	20.000.000	0	20.000.000	
2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	300.000.000	-3.000.000	297.000.000	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	20.000.000	0	20.000.000	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	0	20.000.000	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	20.000.000	-1.520.000	18.480.000	Rasionalisasi pada Belanja Honor Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah dan Belanja Jasa Paket Pengiriman sebesar 1.520.000

2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	20.000.000	-1.480.000	18.520.000	Rasionalisasi pada Belanja Honor Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah, Belanja Jasa Paket Pengiriman, Belanja Bahan Cetak dan Belanja BBM sebesar 1.480.000
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	240.000.000	0	240.000.000	
2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25.000.000	0	25.000.000	
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	215.000.000	0	215.000.000	
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	0	0	
2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	0	0	
2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	15.066.201.164	-25.000.000	15.050.541.164	
2.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	14.664.173.164	-7.660.000	14.656.513.164	
2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000	0	160.000.000	
2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	0	40.000.000	
2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000	0	95.000.000	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.585.887.571	0	11.585.887.571	

2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.358.747.571	0	11.358.747.571	Kebutuhan gaji berdasarkan hasil rekon bersama BPKAD
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.140.000	0	170.140.000	
2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.000.000	0	57.000.000	
2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	
2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	0	15.000.000	
2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	0	10.000.000	
2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.500.000	-2.250.000	66.250.000	
2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.500.000	-2.250.000	56.250.000	Rasionalisasi pada Belanja Pakaian Dinas 3 (tiga) Stel sebesar 2.250.000
2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	10.000.000	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.975.450	0	400.975.450	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	0	11.000.000	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.415.000	0	30.415.000	
2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.754.600	0	58.754.600	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.176.000	0	33.176.000	
2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.480.000	0	18.480.000	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.149.850	0	239.149.850	
2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	0	10.000.000	

2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	0	20.000.000	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0	20.000.000	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.210.038.550	-5.410.000	2.204.628.550	
2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	0	15.000.000	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	745.829.160	0	745.829.160	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.449.209.390	-5.410.000	1.443.799.390	Rasionalisasi pada Belanja Honor Pejabat Pengadaan 1 Org x 8 Bulan sebesar 5.410.000
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.771.593	0	193.771.593	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.971.593	0	132.971.593	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000	0	58.000.000	
2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.800.000	0	2.800.000	
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	332.028.000	-15.978.000	325.390.000	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	101.028.000	-2.868.000	98.160.000	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	45.028.000	-1.500.000	43.528.000	Rasionalisasi pada Belanja Perjalanan Dinas Kab/Kota dan Belanja BBM sebesar 1.500.000
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	22.000.000	-1.368.000	20.632.000	Rasionalisasi pada Belanja Lembur dan Belanja Makan dan Minum Rapat sebesar 1.368.000
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	12.000.000	0	12.000.000	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	22.000.000	0	22.000.000	

2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	158.000.000	-2.270.000	155.730.000	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	28.000.000	0	28.000.000	
2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	30.000.000	-620.000	29.380.000	Rasionalisasi pada Belanja Makan dan Minum Rapat sebesar 620.000
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	75.000.000	-1.650.000	73.350.000	Rasionalisasi pada Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Belanja Bahan Cetak sebesar 1.650.000
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	73.000.000	-1.500.000	71.500.000	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	23.000.000	0	23.000.000	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	50.000.000	-1.500.000	48.500.000	Rasionalisasi pada Belanja Perjalanan Dinas (Tiket Narasumber Pusat) sebesar 1.500.000
2.24.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	70.000.000	-1.362.000	68.638.000	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000	0	25.000.000	
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	0	0	0	

2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0	0	0	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	20.000.000	-1.362.000	18.638.000	
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0	0	0	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000	-1.362.000	18.638.000	Rasionalisasi pada Belanja Lembur sebesar 1.362.000
2.24.04	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	0	0	0	
2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	0	0	0	
2.24.04.1.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0	
2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan	0	0	0	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

---

**BERITA ACARA**

**PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

---

Nomor : I /V/PPM 4/Bappeda-2024

**Dasar pelaksanaan kegiatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

**Pelaksanaan Kegiatan :**

Hari / Tanggal : Senin, 13 sd. Senin, 20 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I, II dan III Bappeda Provinsi Sumatera Barat

**Objek Verifikasi :**

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

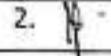
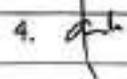
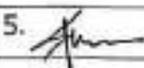
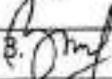
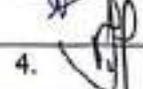
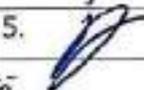
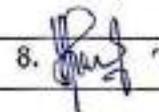
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi Kepegawaian

**Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 sebagaimana daftar hadir pada lampiran 1 Berita Acara ini.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.
  - h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Ado Rietha utami	Biro Organisasi	1. 
2	Afnisal Uman	DPKAD	2. 
3	Rahmah Feni - Feni	Inspektur	3. 
4	Rahmi Indri	Inspektur	4. 
5	Effi Warni	BPEJ	5. 
6	Lidya Febriana		6. 
7	Rizka Octavia	BPPK	7. 
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS :			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Robby Rimbun	Anjak	1. 
2	WENDEI	Akron SPM Muda	2. 
3	Martiana	K. Keuangan	3. 
4	Devri Gusita	Manis SPM	4. 
5	Deni Ircan	Kabul Rajatya	5. 
6	Hasma Wiwi	Katag Mutasi Promosi	6. 
7	Awac	P. Ahli Muda	7.
8	Xulsteri Susanti	sekretaris	8. 
9			9.
10			10.

LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging											Keterangan		
					Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP	
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	20.470.488.000	0	20.470.488.000														
5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	20.470.488.000	0	20.470.488.000														
5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	12.570.951.000	0	12.570.951.000														
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.056.600	0	213.056.600														
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.582.900	0	57.582.900								V	V				V	1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan kabupaten/kota, 2. Pedoman SE Gubernur Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja TA. 2024
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.765.400	0	97.765.400								V	V				V	1. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 2. Perjalanan dinas agar diperhatikan sesuai dengan tugas dan fungsi
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.708.300	0	57.708.300								V	V				V	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Standar Harga Satuan (SHS) Pemprov Sumbar yang berlaku untuk tahun 2024
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.932.104.067	0	8.932.104.067														
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.715.584.267	0	8.715.584.267									V					Dihitung kembali sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.519.800	0	216.519.800									V					Disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.385.100	0	285.385.100														
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.500.000	0	127.500.000									V					Target output disesuaikan dengan jumlah pegawai
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.885.100	0	157.885.100									V				V	1. Perjalanan dinas agar menyesuaikan dengan tugas dan fungsi, 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Standar Harga Satuan (SHS) Pemprov Sumbar yang berlaku untuk tahun 2024, 3. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.264.211.907	0	1.264.211.907														
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.470.200	0	4.470.200									V				V	Disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.000.000	0	165.000.000									V				V	1. Rasionalisasi ATK, Kertas, Bahan Komputer dengan memanfaatkan persuratan secara elektronik melalui aplikasi yang telah ada, 2. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.000.000	0	175.000.000									V				V	Rasionalisasikan belanja cetak dan penggandaan
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	10.000.000									V				V	Dihitung disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	0	8.000.000									V				V	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging											Keterangan			
					Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	901.741.707	0	901.741.707											V			V	Belanja Perjalanan dinas mempedomani SE Gubernur Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.800.000	0	242.800.000															
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.000.000	0	35.000.000											V			V	Disesuaikan dengan RKBMD tahun 2025
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.800.000	0	142.800.000											V			V	1. Disesuaikan dengan RKBMD tahun 2025, 2. Belanja sub kegiatan disesuaikan dengan SE Gubernur Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja (pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak bersifat pelayanan publik agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	0	65.000.000											V			V	Rincian belanja sub kegiatan disesuaikan kembali
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.670.026	0	1.205.670.026															
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	0	8.000.000											V			V	Dihitung sesuai kebutuhan
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	0	250.000.000											V			V	Dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.840.000	0	10.840.000											V			V	Disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.830.026	0	936.830.026											V			V	Dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.723.300	0	427.723.300															
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.650.000	0	137.650.000											V			V	Dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	0	25.000.000											V			V	Rincian belanja diperbaiki kembali
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.300	0	73.300											V			V	Rincian belanja diperbaiki kembali
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000											V			V	1. Belanja jasa konsultasi mengacu pada Standar Remunerasi Tenaga Ahli Jasa Konsultasi sesuai aturan yang berlaku, 2. Belanja jasa konsultasi pengawasan satuan belanja disesuaikan kembali (orang), 3. Rincian belanja diperbaiki dan disesuaikan kembali
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	0	65.000.000											V			V	Dihitung kembali disesuaikan dengan kebutuhan
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	7.899.537.000	0	7.899.537.000															
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.628.537.000	0	4.628.537.000															
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.000.000	0	25.000.000	V										V	V		V	Belanja disesuaikan dengan kebutuhan

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging											Keterangan	
					Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	909.537.000	0	909.537.000	V							V	V			V	1. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Standar Harga Satuan (SHS) Pemprov Sumbang yang berlaku untuk tahun 2024, 3. Belanja sewa hotel diarahkan untuk menggunakan aula atau gedung pertemuan milik pemerintah, 4. Perjalanan dinas agar mempedomani SE Gubernur Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja dan agar perjalanan dinas memperhatikan tugas dan fungsi
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	70.000.000	0	70.000.000	V							V	V			V	1. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 2. Perjalanan dinas agar diperhatikan sesuai dengan tugas dan fungsi
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3.500.000.000	0	3.500.000.000	V							V	V			V	Belanja hibah ke Korpri untuk pelaksanaan Pornas Korpri tahun 2025
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	79.000.000	0	79.000.000	V							V	V			V	1. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 2. Perjalanan dinas agar diperhatikan sesuai dengan tugas dan fungsi
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000	0	45.000.000	V							V	V			V	1. Belanja perjalanan dinas disesuaikan kembali dengan output kegiatan, 2. Bentuk kegiatan : Pengelolaan tata naskah kepegawaian (21 rbu data)
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.335.000.000	0	1.335.000.000													
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	65.000.000	0	65.000.000								V				V	1. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 2. Rincian belanja lembur disesuaikan kembali
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	320.000.000	0	320.000.000								V				V	1. Rincian belanja BBM disesuaikan kembali, 2. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu, 3. Untuk aktivitas penyerahan SK agar disesuaikan periodenya dengan kondisi sekarang 6 kali setahun, 4. Rincian belanja terkait honorarium pengawas ujian agar disesuaikan kembali, 5, Rasionalisasikan perjalanan dinas dengan mempedomani SE Gubernur Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja dan agar perjalanan dinas memperhatikan tugas dan fungsi
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	950.000.000	0	950.000.000								V				V	Perjalanan dinas agar disesuaikan dengan tugas dan fungsi termasuk biaya transportasi perjalanan dinas
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.556.000.000	0	1.556.000.000													
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	120.000.000	0	120.000.000								V	V			V	1. Sewa gedung untuk pembekalan purna tugas ditambahkan, 2. Belanja Makan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya, snack 17 rbu, makan 31 rbu
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	250.000.000	0	250.000.000													Rincian belanja agar memperhatikan efisiensi dan rasionalisasi kegiatan

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Tagging											Keterangan	
					Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mendukung IKU	Mendukung IKD	Penunjang Urusan Pem	IPP	Mendukung Disabilitas		Mendukung Program SAKIP
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	25.000.000	0	25.000.000								V	V			V	Rincian belanja agar menyesuaikan rasionalisasi dan efisiensi perjalanan dinas,
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	730.700.500	0	730.700.500	V							V	V			V	Agar disesuaikan rincian belanja dengan kondisi yang melaksanakan tugas belajar, membuka peluang dan kesempatan ke semua ASN Pemprov dalam mengakses bantuan studi dimaksud.
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40.000.000	0	40.000.000													
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	144.299.500	0	144.299.500													
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	15.000.000	0	15.000.000													
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	30.000.000	0	30.000.000													
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	106.000.000	0	106.000.000													
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	60.000.000	0	60.000.000													
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.000.000	0	35.000.000													
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	380.000.000	0	380.000.000													
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000	0	35.000.000													
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	115.000.000	0	115.000.000													
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	25.000.000	0	25.000.000													
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	180.000.000	0	180.000.000													
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25.000.000	0	25.000.000													

## LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.03.0.00.0.00.01.0000	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>18.302.695.320</b>	<b>-86.440.000</b>	<b>18.216.255.320</b>	
05:03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	18.302.695.320	-86.440.000	18.216.255.320	
05:03:01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	14.187.573.020	-61.240.000	14.126.333.020	
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>252.072.335</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>248.072.335</b>	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.513.500	-4.000.000	78.513.500	Pelaksanaan Forum OPD sudah berlangsung, dapat dilakukan pengurangan sebesar Rp. 4jt dari sisa honorarium.
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169.558.835	0	169.558.835	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.957.993.202</b>	<b>0</b>	<b>10.957.993.202</b>	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.741.473.402	0	10.741.473.402	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja., Pastikan sesuai kebutuhan di OPD.
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.519.800	0	216.519.800	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	
<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	
5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>272.500.000</b>	<b>-57.240.000</b>	<b>215.260.000</b>	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.500.000	-17.240.000	110.260.000	Pengurangan/Rasionalisasi Rp. 17.240.000
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.000.000	-40.000.000	105.000.000	Pengurangan frekwensi pengadaan rakor kepegawaian sebanyak 1 kali senilai 40jt
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.217.952.650</b>	<b>0</b>	<b>1.217.952.650</b>	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.080.000	0	21.080.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.003.800	0	163.003.800	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	172.449.500	0	172.449.500	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.608.000	0	1.608.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	859.811.350	0	859.811.350	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	0	
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	0	9.000.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.159.667.833</b>	<b>0</b>	<b>1.159.667.833</b>	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.323.600	0	7.323.600	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.000.000	0	243.000.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.344.233	0	909.344.233	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>318.387.000</b>	<b>0</b>	<b>318.387.000</b>	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.335.000	0	88.335.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.610.000	0	77.610.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.442.000	0	152.442.000	Agar indikator keluaran konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>05:03:02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.115.122.300</b>	<b>-25.200.000</b>	<b>4.089.922.300</b>	
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>2.398.464.000</b>	<b>0</b>	<b>2.398.464.000</b>	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	19.500.000	0	19.500.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	197.762.500	0	197.762.500	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65.000.000	0	65.000.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.000.000.000	0	2.000.000.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	58.219.700	0	58.219.700	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	57.981.800	0	57.981.800	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>862.425.600</b>	<b>0</b>	<b>862.425.600</b>	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	65.000.000	0	65.000.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	229.716.600	0	229.716.600	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	567.709.000	0	567.709.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>543.036.400</b>	<b>-25.200.000</b>	<b>517.836.400</b>	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	47.566.900	0	47.566.900	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	142.889.500	0	142.889.500	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	168.550.000	-25.200.000	143.350.000	Pengurangan 25,200,000 pada pengadaan Goodybag
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	24.600.000	0	24.600.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	25.400.000	0	25.400.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	54.131.100	0	54.131.100	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	49.417.800	0	49.417.800	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30.481.100	0	30.481.100	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>311.196.300</b>	<b>0</b>	<b>311.196.300</b>	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.782.000	0	24.782.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	112.421.000	0	112.421.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	20.903.100	0	20.903.100	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	135.500.000	0	135.500.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14.090.200	0	14.090.200	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	3.500.000	0	3.500.000	Agar indikator keluaran agar konsisten dan terlihat upaya pencapaiannya pada rincian belanja.



## **BERITA ACARA**

### **PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

Nomor : /V/PPM1/Bappeda-2024

#### **Dasar pelaksanaan kegiatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024.
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024.

#### **Pelaksanaan Kegiatan :**

Hari / Tanggal : Senin, 13 sd. Senin, 20 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai I, II dan III Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### **Objek Verifikasi :**

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) **Badan Penelitian dan Pengembangan** Tahun 2025

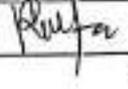
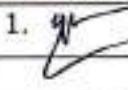
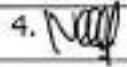
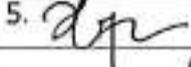
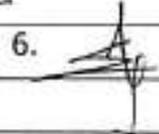
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) **Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024**
3. Melaksanakan Urusan/Fungsi **Penelitian dan Pengembangan**

**Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 :**

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama dengan Perangkat Daerah **telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024** sebagaimana daftar hadir pada **lampiran 1 Berita Acara ini**.
2. **Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani** terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategi 2021-2026, Tujuan 2021-2026, Sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026, Strategi 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2021 dan Indikator Kinerja Program 2021-2021, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. **Penjelasan terkait dengan Point 2 diatas sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yakni sebagai berikut :**
  - a. **Permasalahan Pembangunan** adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - b. **Isu Strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  - c. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  - d. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - e. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
  - f. **Arah Kebijakan** adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - g. **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.
  - h. **Indikator Kinerja** adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (Impact)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil verifikasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1 : DAFTAR HADIR**

TIM VERIFIKASI			
NO	NAMA	SKPD	TANDATANGAN
1	Elfi Endri	Bappeda	1. 
2	SONNI YULINA	DIPA	2. 
3	Rani Israsari	Biro Organisasi	3. 
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
PERANGKAT DAERAH YANG DIBAHAS : Badan Penelitian dan Pengembangan			
No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Yusko H	Sekwan	1. 
2	Mahmuda Husain	Kabid Motor	2. 
3	T. Dory P	DKK	3. 
4	Nensy Krisna Barshal	Kasubag Pro & Keu	4. 
5	Mestika Riani	Analisis Pemanf. Iptek	5. 
6	Endri Putra	Fungsional Pamlit	6. 
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

**LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA TAHUN 2025**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.272.793.000	0	17.272.793.000												
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.272.793.000	0	17.272.793.000												
05.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.428.058.000	0	8.428.058.000												
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.000.000	0	340.000.000												
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.000.000	0	185.000.000											V	1. Rincian belanja dianggarkan disesuaikan dengan pencapaian target ouput 2. Menampung kegiatan forum Perangkat daerah, direncanakan di Bukittinggi, di Aula Istana Bung Hatta 3. Menampung Rakor Kelitbangan, direncanakan di Istana Bung Hatta 4. Makam minum rapat disesuaikan kembali. 5. Penggaran ATK dan bahan cetakan harus efisien hanya untuk pencapaian target ouput
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000	0	120.000.000											V	1. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian disesuaikan kembali 2. Sesuai dengan arahan pimpinan kegiatan studi implementasi belum diperbolehkan. 3. Perjalanan dinas luar provinsi dipindahkan ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	0	35.000.000												1. Kegiatan mengakomodir survey IKM dilaksanakan oleh konsultan
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.386.388.000	0	6.386.388.000												
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.160.588.000	0	6.160.588.000											V	1. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 2. Penyediaan gaji dan tunjangan agar dipenuhi untuk 1 tahun anggaran, disesuaikan kembali .
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190.800.000	0	190.800.000											V	1. Mengakomodir honor pengelola keuangan
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000	0	35.000.000											V	1. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 2. Penganggaran ATK agar efisien, diperuntukkan untuk pencapaian target
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.000.000	0	47.000.000												
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	0	25.000.000												1. Menampung anggaran asuransi kendaraan dinas operasional
5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	0	7.000.000												1. Sub kegiatan dihilangkan saja



Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000	0	160.000.000											V	1. Mengakomodir biaya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	0	15.000.000											V	1. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali
05.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	8.844.735.000	0	8.844.735.000												
5.05.02.1.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	2.625.000.000	0	2.625.000.000												
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.200.000.000	0	1.200.000.000									V	V		1. kegiatan berupa inovasi, IPKD, IID dan Penelitian  2. Lingkup kegiatan ke Kabupaten/Kota. 3. Rincian belanja yang dianggarkan harus sesuai untuk pencapaian target output 4. Pengadaan ATK dan bahan cetakan agar disatukan saja, jangan dipecah kegiatan, disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target output 5. Jasa Narasumber disesuaikan dengan kebutuhan real kegiatan yang dibutuhkan 6. Perjalanan dinas disesuaikan kembali dengan
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	1.150.000.000	0	1.150.000.000									V	V		1. Bentuk kegiatan berupa kerjasama, penelitian dan evaluasi terhadap pemerintahan umum 2. Rincian belanja diperbaiki kembali, memperhatikan kebutuhan real untuk pencapaian target (seperti anggaran jasa narasumber, makan minum, perjalanan 3. Untuk kegiatan ekspe, penelitian dan seminar nasional agar dihilangkan (RP. 198.880.000) 4. Perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target. 5. Sisa anggaran dipindahkan untuk penambahan gaji dan tunjangan yang masih kurang
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	275.000.000	0	275.000.000									V	V		1. Kegiatan berbentuk riset dan rakor fungsional peneliti 2. Rincian belanja diperbaiki dan disesuaikan kembali, yang dianggarkan hanya untuk pencapaian target sub 3. ATK dan bahan cetakan dianggarkan sesuai untuk pencapaian output kegiatan. 4. Honorarium yang terkait tupoksi tidak boleh dianggarkan. agar dihilangkan. 5. Penganggaran jasa konsultasi untuk pengembangan aplikasi e-riset agar diperbaiki kembali spesifikasi jasa konsultasinya (pada Rincian jasa konsultasi yang dianggarkan untuk juru gambar, tidak sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi e-riset
																6. Perjalanan dinas dirinci kembali, jika perjalanan dinas lebih dari satu hari, hari diperhitungkan dengan penginapan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	814.000.000	0	814.000.000												
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	300.000.000	0	300.000.000	V									V		1. Kegiatan berupa pelaksanaan penelitian. 2. . Rncian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaa untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali. 3. Narasumber dianggarkan untuk penjaminan mutu 4 .Pengolah dan Enumerator Data diambil dari tenaga luar, karena tidak cukup dari tenaga di Balitbang. 5 . Kebutuhan perjalanan dinas dan penginapan disesuaikan kembali
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000	0	275.000.000	V									V		1. Kegiatan berupa penelitian 2. . Rncian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaa untuk pencapaian taroet. rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biava vano berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	239.000.000	0	239.000.000	V									V		1. Kegiatan berupa penelitian 2. . Rncian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.705.000.000	0	2.705.000.000												
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000	0	300.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penelitian 2. . Rncian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	600.000.000	0	600.000.000	V								V	V		1. Kegiatan berupa penelitian  2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	275.000.000	0	275.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penelitian  2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	350.000.000	0	350.000.000	V								V	V		1. Kegiatan berupa penelitian  2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	280.000.000	0	280.000.000	V								V	V		1. Kegiatan berupa penelitian  2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku.
																4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	300.000.000	0	300.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penelitian 2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	300.000.000	0	300.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penelitian  2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku.
																4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	300.000.000	0	300.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penelitian 2. . Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 3. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku. 4 .Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah dirubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>2.700.735.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.735.000</b>												
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.450.735.000	0	1.450.735.000									V	V		1. Kegiatan berupa rekayasa peralatan dan penelitian serta Lomba TTG  2. Kegiatan berupa penelitian 3. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Progul	SPM	Stunting	Kemiskinan	DAK	Pokir	Mandatori Pusat	Direktif	IKU	IKD	Penunjang Ur Pem	Keterangan
																4. Honorarium jasa peneliti agar memperhatikan standar biaya yang berlaku.
																5. Sesuai dengan hasil temuan BPK Tahun 2022 honorarium ASN merujuk pada Perpres 33 yang telah diubah maka honorarium ASN tidak boleh dibayarkan termasuk Peneliti dari ASN (fungsional peneliti) tidak dibayarkan honorarium peneliti karena merupakan tupoksi. Untuk surat edaran dapat dikordinasikan dengan BPKAD dan Inspektorat
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	850.000.000	0	850.000.000									V	V		1. Kegiatan berupa penerapan hasil rekaya dn bimtek.  2. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	400.000.000	0	400.000.000									V	V		1. Rincian belanja yang dianggarkan hanya yang berkenaan untuk pencapaian target, rincian diperbaiki kembali 2. Honorarium kegiatan, untuk ASN tidak boleh dianggarkan dan dibayarkan (honor editor dan reviewer internal)

**LAMPIRAN VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.05.0.00.0.00.01.0000	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	12.334.564.440	-60.000.000	12.274.564.440	
05.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	12.334.564.440	-60.000.000	12.274.564.440	
05.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	9.139.564.440	-60.000.000	9.079.564.440	
5.05.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	334.167.856	0	334.167.856	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.354.856	0	180.354.856	
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.813.000	0	118.813.000	
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	0	35.000.000	
5.05.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.528.005.779	0	6.528.005.779	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.301.385.779	0	6.301.385.779	
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.460.000	0	193.460.000	
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.160.000	0	33.160.000	
5.05.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	47.700.000	0	47.700.000	
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	0	25.000.000	
5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.310.000	0	7.310.000	
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.390.000	0	15.390.000	
5.05.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	187.323.455	-60.000.000	127.323.455	
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000	0	55.500.000	
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.823.455	-60.000.000	71.823.455	1. Efisiensi anggaran dari anggaran capacity building (outbound) yang direncanakan pada tanggal 17s/d 19 Mei tetapi tidak dilaksanakan karena adanya bencana alam di Kabupaten Tanah Datar. 2. Anggaran sudah direalisasikan untuk baju lapangan outbound karena sudah dipesan sebelumnya
5.05.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	890.507.350	0	890.507.350	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	0	3.000.000	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.125.000	0	106.125.000	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.165.000	0	52.165.000	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	0	20.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	0	7.500.000	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.717.350	0	701.717.350	
<b>5.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25.460.000</b>	<b>0</b>	<b>25.460.000</b>	
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000	0	5.000.000	
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.460.000	0	20.460.000	
<b>5.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>912.000.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000.000</b>	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0	12.000.000	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	0	50.000.000	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.000.000	0	850.000.000	
<b>5.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.400.000</b>	<b>0</b>	<b>214.400.000</b>	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.400.000	0	164.400.000	
05.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	3.195.000.000	0	3.195.000.000	
<b>5.05.02.1.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>835.000.000</b>	<b>0</b>	<b>835.000.000</b>	
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	365.000.000	0	365.000.000	
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	345.000.000	0	345.000.000	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	125.000.000	0	125.000.000	
<b>5.05.02.1.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	150.000.000	0	150.000.000	
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000	0	150.000.000	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000	0	150.000.000	
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	150.000.000	0	150.000.000	
<b>5.05.02.1.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>945.000.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000.000</b>	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	165.000.000	0	165.000.000	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	270.000.000	0	270.000.000	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	170.000.000	0	170.000.000	
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0	0	0	
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	160.000.000	0	160.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	Keterangan
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	180.000.000	0	180.000.000	
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>815.000.000</b>	<b>0</b>	<b>815.000.000</b>	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	425.000.000	0	425.000.000	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	250.000.000	0	250.000.000	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	140.000.000	0	140.000.000	